

Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2022

Risnanda¹, Mahrizal², Yayuk Eko Wahyuningsih³

Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespodensi: risnanda2019@gmail.com

Diterima: 23-07-2024 | Disetujui: 25-07-2024 | Diterbitkan: 29-07-2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of inflation, provincial minimum wage and open unemployment rate on the poor population in West Aceh Regency 2007-2022. West Aceh is one of the districts that has a high level of poor people, so it is necessary to analyze the factors that influence the level of poor people in West Aceh Regency. The type of research used is quantitative research using multiple linear regression methods with time series data for 2007-2022, namely 16 years including inflation data, provincial minimum wage data, open unemployment rate data, poor population data and processed using the SPSS 25 program. The analysis used is multiple linear regression analysis, t test, F test and coefficient of determination (R²). The results of this research show that simultaneously, namely the F Inflation test, the Provincial Minimum Wage and the Open Unemployment Rate together have an influence on the Poor Population in West Aceh Regency in 2007-2022. Meanwhile, partially, namely the t test, it was concluded that inflation had a negative and significant effect on the poor with $t_{count} (-2.727) > t_{table} (-2.179)$ and a significant value $(0.018) < 0.05$, the provincial minimum wage has a negative and significant effect on the poor with $t_{count} (-58.736) > t_{table} (-2.179)$ and a significant value $(0.000) < 0.05$, the open unemployment rate has a negative and significant effect on poor people with $t_{count} (-5.990) > t_{table} (-2.179)$ and significant value $(0.000) < 0.05$. Determinan adjusted R Square Sebesar 0.997 This shows that 99.7% of the poor population in West Aceh district is influenced by the influence variables of Inflation, Provincial Minimum Wage and Open Unemployment Rate, while the remaining 0.3% is influenced by other variables outside this research.

Keywords: Inflation, Provincial Minimum Wage, Open Unemployment Rate, Poor Population.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat tahun 2007-2022. Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai tingkat penduduk miskin yang tinggi, sehingga perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier berganda dengan data time series tahun 2007-2022 yaitu 16 tahun meliputi data inflasi, data upah minimum provinsi, data tingkat pengangguran terbuka, data penduduk miskin dan diolah menggunakan program SPSS 25. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan yaitu uji F Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2022. Sedangkan secara parsial yaitu uji t disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin dengan thitung $(-2,727) > t_{tabel} (-2,179)$ dan nilai signifikan $(0,018) < 0,05$ maka upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin dengan thitung $(-58,736) > t_{tabel} (-2,179)$ dan nilai signifikan $(0,000) < 0,05$ maka tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penduduk miskin dengan thitung $(-5,990) > t_{tabel} (-2,179)$ dan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$. determinan customized R Square Sebesar 0,997 Hal ini menunjukkan bahwa 99,7% penduduk miskin di kabupaten Aceh Barat dipengaruhi oleh variabel pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka, sedangkan sisanya sebesar 0,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci : Inflasi, Upah Minimum Provinsi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Penduduk Miskin.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Risnanda, R., Mahrizal, M., & Wahyuningsih, Y. E. (2024). Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2022. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 715-727. <https://doi.org/10.62710/4b201w46>

PENDAHULUAN

Provinsi Aceh merupakan provinsi di pulau sumatera yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi menurut catatan dari badan pusat statistik beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi komoditas makanan dan kebutuhan. Angka kemiskinan di Provinsi Aceh masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Oleh karena itu persoalan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Terdapat masih banyak masyarakat yang berpendapatan rendah dan berada dibawah garis kemiskinan. Padahal Provinsi Aceh terkenal dengan banyak sumber daya alamnya yang melimpah untuk dimanfaatkan, namun sayangnya belum bisa juga mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Di banyak negara di dunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kabupaten Aceh Barat yang merupakan bagian dari provinsi Aceh turut menyumbang angka kemiskinan.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Barat Pada Tahun 2017-2021

No	Tahun	Tingkat Kemiskinan Indonesia	Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Aceh Barat
1	2017	10,12	15,92	20,28
2	2018	9,82	15,68	19,31
3	2019	9,22	15,01	18,79
4	2020	10,19	15,43	18,34
5	2021	9,71	15,53	18,81

Berdasarkan data Tabel 1. di atas kemiskinan di Indonesia dan provinsi Aceh menunjukkan bahwa jumlah kemiskinan di Indonesia dan provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 kemiskinan di Indonesia berada pada tingkat 10,12 % turun menjadi 9,22% pada tahun 2019 dan provinsi Aceh pada tingkat 15,92 % juga mengalami penurunan hingga 15,01% pada tahun 2019 dan kembali naik pada tingkat 15,53 % pada tahun 2021 dan Indonesia pada tingkat 9,71 % pada tahun 2021. Sedangkan kabupaten aceh barat tingkat kemiskinan pada tahun 2017 di tingkat 20,28 % lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di provinsi aceh, tingkat kemiskinan di kabupaten aceh barat dari 2017 mengalami penurunan sampai tahun 2020 di tingkat 18,34% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 di tingkat 18,81%.

Kemiskinan di provinsi Aceh dan kabupaten aceh barat disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi pemicu kemiskinan. Diantaranya tingkat inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi di provinsi Aceh dan di kabupaten Aceh Barat.

Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2022

(Risnanda, et al.)

Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Pengangguran dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan di suatu wilayah tertentu tidak dapat mencukupi jumlah angkatan kerja atau jumlah permintaan akan lapangan pekerjaan akan penawaran lapangan kerja tidak seimbang.

Penyebab lain terjadinya pengangguran adalah adanya kekakuan upah (Wage rigidity) yaitu gagalnya upah melakukan penyesuaian sampai penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya. Upah riil memang berubah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, tetapi upah tidak selalu fleksibel. Kadang-kadang upah riil tertahan di tingkat kliring pasar (market clearing level) atau tingkat ekuilibrium. Ketika upah riil berada di atas tingkat yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekakuan upah riil mengurangi tingkat perolehan kerja dan mempertinggi pengangguran. Pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjumlahan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Ketika pemerintah mempertahankan agar upah tidak mencapai tingkat ekuilibrium maka dapat menimbulkan kekakuan upah. Para ekonom percaya bahwa upah minimum memiliki dampak terbesar terhadap pengangguran usia muda.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengamati masalah kemiskinan dan mengkaji secara lebih mendalam, dalam hal ini penulis tertarik mengkaji masalah kemiskinan yang ada di daerah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan salah satu daerah yang ada di dalam Provinsi Aceh Tahun 2017-2022.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi inflasi, tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP), Jumlah Pengangguran Terbuka dan penduduk miskin di kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2007 – 2022, Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk time series dalam runtun waktu 2007-2022 yang didapat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dengan metode regresi berganda dengan bantuan program SPSS 25.

Model persamaan ekonometrika yang digunakan sebagai berikut :

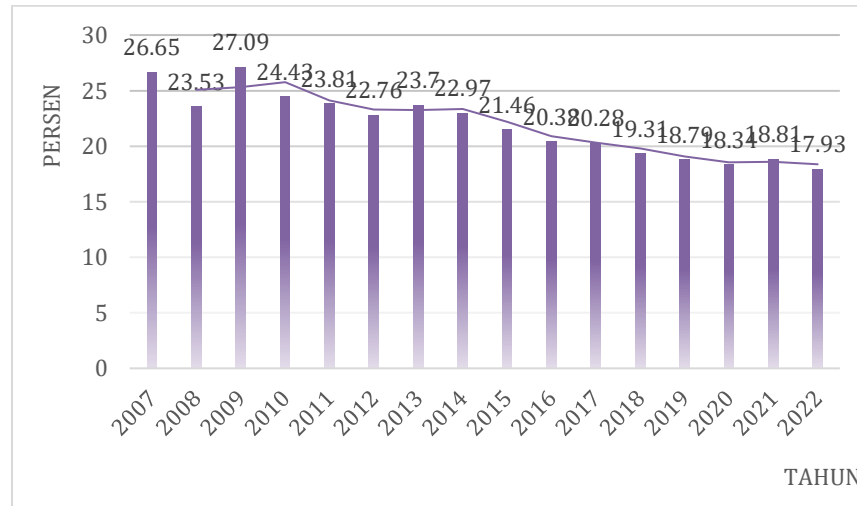
$$PM_t = \beta_0 + \beta_1 INF_t + \beta_2 UMP_t + \beta_3 UE_t + e_t$$

Dimana:

- PM = Penduduk Miskin
- INF = Inflasi
- UMP = Upah Minimum Provinsi
- UE = Tingkat Pengangguran
- β = Konstanta/Intercept
- $\beta_1, \dots$ = Koefisien Regresi
- e = Error Term
- t = time (tahun)

HASIL DAN PEMBAHASAN

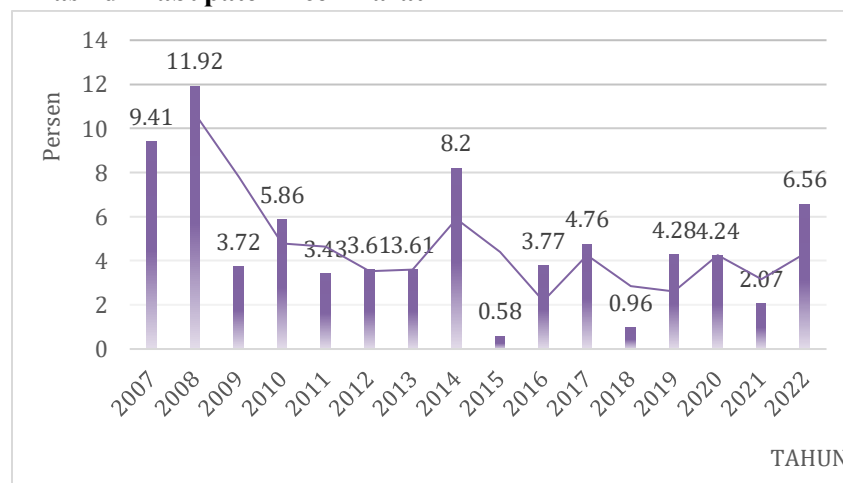
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat



Grafik 1. Persentase Tingkat Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat 2007-2022.

Penduduk miskin di kabupaten Aceh Barat dari tahun 2007-2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2008 penduduk miskin sebesar 23.25 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2009 sebesar 27.09 persen. Dan terus menurun setiap tahunnya hingga tahun 2022 tercatat sebesar 17.93 persen.

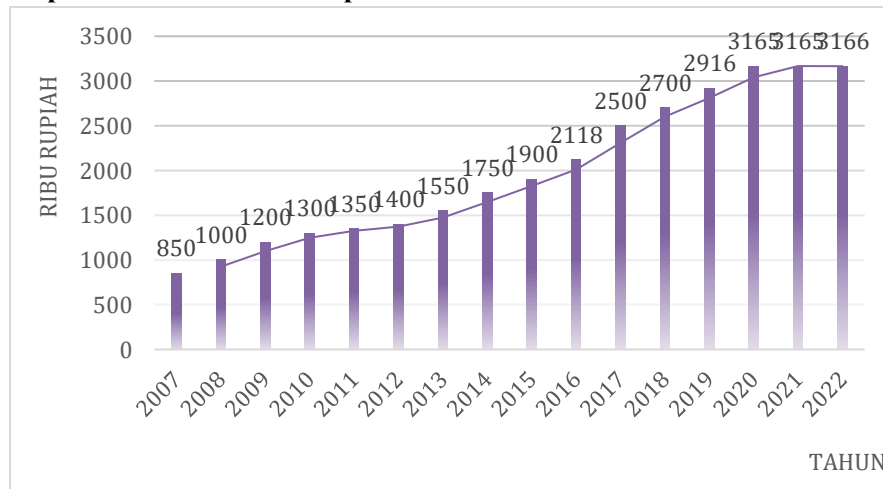
Perkembangan Inflasi di Kabupaten Aceh Barat



Grafik 2. Persentase Tingkat Inflasi Kabupaten Aceh Barat 2007-2022.

laju inflasi di Kabupaten Aceh Barat memiliki tren yang fluktuatif dari tahun 2007-2022. Pada tahun 2008 dan 2014 laju inflasi di Aceh Barat merupakan laju inflasi tertinggi dibandingkan tahun yang lainnya dengan 11.92 dan 8.2 persen disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi secara nasional pada bulan November 2014 yang berefek pada kenaikan harga barang secara umum. Inflasi terendah yang tercatat pada tahun 2015 dengan laju 0.58 persen disebabkan oleh deflasi pada Kelompok Bahan Makanan, kelompok sandang dan kelompok perumahan. Pada tahun terakhir tercatat yaitu 2022 laju inflasi sebesar 6.56 persen.

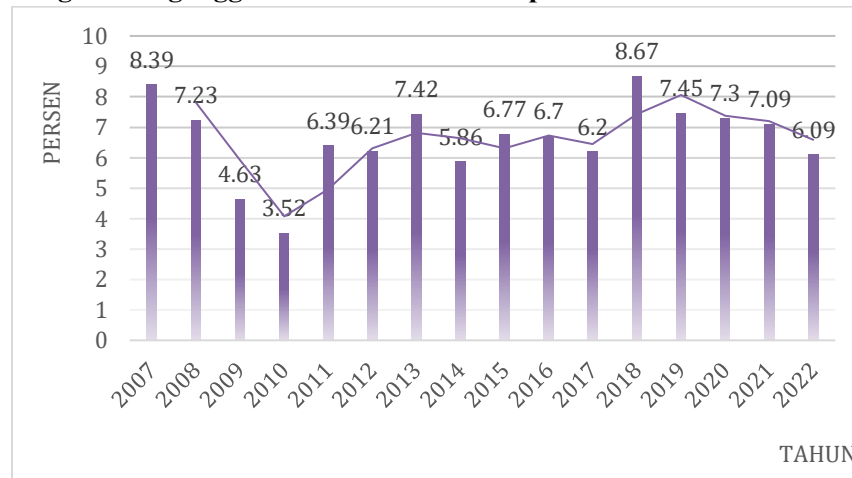
Perkembangan Upah Minimum di Kabupaten Aceh Barat



Grafik 3. Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2007-2022

Tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditentukan oleh gubernur Aceh mengalami peningkatan setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2007 jumlah Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh berjumlah sebesar Rp. 850.000,- dan pada tahun 2013 sebesar Rp. 1.550.000,- pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.750.000,- dan terus mengalami peningkatan sehingga data tahun terakhir yang diperoleh pada tahun 2022 Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh berjumlah sebesar Rp. 3.166.460. ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Aceh mengambil kebijakan langkah yang tepat untuk mensejahterakan rakyatnya dengan meningkatkan jumlah upah minimum provinsi setiap tahunnya. Sehingga dengan meningkatkan jumlah pemberian upah minimum maka diharapkan dapat memotivasi masyarakat khususnya angkatan kerja untuk bekerja dan diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Provinsi Aceh.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Aceh Barat.



Grafik 4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Barat 2007-2022

Tingkat pengangguran terbuka di kabupaten Aceh Barat dari tahun 2007-2022 mengalami fluktuasi, terlihat pada tahun 2007 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8.39 persen. sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 3.52 persen. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 8.67 persen. Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 8,67 persen, dan pada tahun 2019-2022 persentase tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan hingga 6,09 persen.

Hasil Analisa Data

Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	30.015	.243		123.511	.000
1 INFLASI	-.041	.015	-.044	-2.727	.018
UMP	-3.309E-6	.000	-.989	-58.736	.000
TPT	-.197	.033	-.092	-5.990	.000

a. Dependent Variable: PENDUDUK MISKIN

Pada Tabel 2 tersebut didapatkan hasil perhitungan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$PM_t = 30.015 - 0.041 INF_t - 3.309E-6 UMP_t - 0.197 Uet + et$$

- Nilai konstanta sebesar 30.015, hal ini berarti apabila variabel bebas yakni inflasi, upah minimum provinsi, dan pengangguran terbuka tidak mengalami perubahan atau sama dengan nol maka penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat Sebesar 30.015.

- b. Koefisien regresi untuk variabel inflasi sebesar - 0.041 (negative), menunjukkan pengaruh tidak searah artinya jika setiap inflasi ditingkatkan dalam satu satuan penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat akan turun sebesar - 0.041
- c. Koefisien regresi untuk upah minimum provinsi sebesar -3.309E-6 (negative), menunjukkan pengaruh berlawanan artinya jika setiap variabel upah minimum provinsi ditingkatkan dalam satu satuan maka penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat akan menurun sebesar -3.309E-6
- d. Koefisien regresi untuk tingkat pengangguran terbuka sebesar - 0.197 (negative), menunjukkan pengaruh berlawanan artinya jika setiap variabel tingkat pengangguran terbuka ditingkatkan dalam satu satuan maka penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat akan menurun sebesar - 0.197

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
INFLASI (X1)	0.818	1.222
UMP (X2)	0.767	1.304
TPT (X3)	0.931	1.074

Berdasarkan tabel 3 diketahui variabel X1 memperoleh VIF yaitu 1.222, variabel X2 memperoleh nilai VIF yaitu 1.304 dan variabel X3 memperoleh nilai VIF yaitu 1.074, artinya semua variabel bebas memperoleh nilai VIF lebih kecil dari 10 (< 10). Sedangkan nilai Tolerance yang diperoleh lebih besar dari 0,10 ($> 0,10$), dengan nilai Tolerance X1 yaitu 0.818, nilai Tolerance X2 yaitu 0.767, nilai Tolerance X3 yaitu 0.931. dengan demikian disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji AutoKorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	.633 ^a	.401	-.027	.09344581

Tabel 4 menunjukkan bahwa output r square adalah 0.401, dengan nilai n observasi sebanyak 16 maka besarnya nilai X^2 Hitung pada persamaan ini adalah $16 \times 0,401 = 6.416$. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai X^2 tabel dengan tingkat signifikansinya 0,05 didapat nilai X^2 tabel sebesar 7.814. Kesimpulan Nilai X^2 Hitung (6.416) $<$ Nilai X^2 Tabel (7.814), Maka Model Persamaan Regresi Tidak Mengandung Masalah Autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.183	.390		3.032	.011
	dX1	-.078	.057	-.389	-1.380	.195
	dX2	-1.922E-6	.000	-.245	-.895	.390
	dX3	-.122	.154	-.225	-.791	.446

Dependent Variable: AbsUt1

Tabel 5 di atas dapat diartikan bahwa di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, menunjukkan nilai signifikansi variabel Inflasi dX1 sebesar 0,197, UMP dX2 sebesar 0,390, TPT X3 sebesar 0,446, hasil tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai AbsUt1, hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas signifikansinya yang diatas 0.05 atau 5%.

Uji t-statistik

Tabel 6. Uji t

Model	t Hitung	Sig	t Tabel
Konstanta	123.511	0.000	2.179
INFLASI (X1)	-2.727	0.018	-2.179
UMP (X2)	-58.736	0.000	-2.179
TPT (X3)	-5.990	0.000	-2.179

Dari Tabel 6 di atas maka hasil Uji t diputuskan sebagai berikut :

1. Variabel Inflasi (X1), diperoleh $t_{hitung} (-2.727) > t_{tabel} (-2.179)$ dan nilai signifikan $(0.018) < 0.05$. Artinya, variabel Inflasi Terdapat Pengaruh secara nyata dan signifikan terhadap Penduduk Miskin di Aceh Barat.
2. Variabel UMP (X2), diperoleh $t_{hitung} (-58.736) > t_{tabel} (-2.179)$ dan nilai signifikan $(0.000) < 0.05$. Artinya, variabel UMP Terdapat Pengaruh secara nyata dan signifikan terhadap Penduduk Miskin di Aceh Barat.
3. Variabel TPT (X3), diperoleh $t_{hitung} (-5.990) > t_{tabel} (-2.179)$ dan nilai signifikan $(0.000) < 0.05$. Artinya, variabel UMP Terdapat Pengaruh secara nyata dan signifikan terhadap Penduduk Miskin di Aceh Barat.

Uji F-statistik

Tabel 7. Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	113.611	3	37.870	1529.230	.000 ^b
Residual	0.297	12	0.025		
Total	113.908	15			

Tabel 7 menunjukkan nilai signifikan untuk pengaruh X1, X2, X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai $F_{hitung} 1529.230 > F_{tabel} 4.41$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X (inflasi, upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran terbuka) secara simultan terhadap variabel Y (penduduk miskin) di Aceh Barat.

Koefisien determinasi R²

Tabel 8. Uji Determinan R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0.999 ^a	0.997	0.997	0.15737

Berdasarkan tabel 8 diketahui nilai determinan adjusted R Square Sebesar 0.997 hal ini menunjukkan 99.7 % penduduk miskin di kabupaten Aceh Barat dipengaruhi oleh variabel inflasi, upah minimum provinsi dan tingkat pengangguran terbuka sedangkan sisanya 0.3 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji t pada variabel inflasi t hitung $(-2.727) > t_{tabel} (-2.179)$ dan nilai signifikan $(0.018) < 0.05$. Artinya variabel inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat dimana semakin meningkatnya inflasi maka akan menurunkan angka penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat.
2. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji t pada variabel upah minimum provinsi t hitung $(-58.736) > t_{tabel} (-2.179)$ dan nilai signifikan $(0.000) < 0.05$. Artinya variabel upah minimum provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat dimana semakin meningkatnya upah minimum provinsi maka akan menurunkan angka penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat.
3. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji t pada variabel tingkat pengangguran terbuka t hitung $(-5.990) > t_{tabel} (-2.179)$ dan nilai signifikan $(0.000) < 0.05$. Artinya variabel pengangguran terbuka

Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2007-2022

(Risnanda, et al.)

berpengaruh negatif signifikan terhadap penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat dimana semakin meningkatnya tingkat pengangguran terbuka maka akan menurunkan angka penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat.

4. Berdasarkan uji R² (Koefisien Determinasi) dimana perhitungan analisis koefisien korelasi dan determinasi dapat menjelaskan bahwa nilai yang digunakan menunjukan R² yaitu sebesar 0,997 (97%) menunjukan bahwa variabel dependen penduduk miskin (Y) yang dapat di jelaskan oleh variabel independen yaitu variabel inflasi, upah minimum provinsi, dan pengangguran terbuka (X). sedangkan sisanya (0,3%) dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Model yang di kembangkan dalam penelitian ini masih terbatas pada pengaruh inflasi, upah minimum provinsi, pengangguran terbuka terhadap penduduk miskin. Oleh karena itu, diperlukan studi lanjutan dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak yang terkait dengan jumlah penduduk miskin di kabupaten Aceh Barat.

REFERENSI

- Abdul, K. (. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Alisman, A., Hasanah, U., Yusuf, Z., Syamsuddin, N., & Sufriadi, D. (2022). Dampak Upah Minimum Regional dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Menengah di Kabupaten Nagan Raya. *ECo-Buss*, 5(2), 647–659.
<https://doi.org/10.32877/eb.v5i2.597>
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi pembangunan*. Edisi 5 .Yogyakarta: STIM YKP
- Boediono. 2005. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- BPS. (2019). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*. Retrieved From [Https://Sirusa.Bps.Go.Id/](https://Sirusa.Bps.Go.Id/)
- Cokrowidagdo, N. (2017). Pengaruh tingkat inflasi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di propinsi jawa timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2).
- Gilarso, T. (2003). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Karnisius.
- Hakim, A.k. (2006). *Aspek Hukum Pengupahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. L., Hanim, A., & Cahyo, H. (2019). Pengaruh Investasi Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Jember Tahun 2000-2015. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 6(1), 81-84.
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191-206.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Insukindro. 2003. *Ekonometrika Dasar*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Ise, N. F., Kawung, G. M., & Rorong, I. P. F. (2022). Pengaruh Inflasi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kota Manado Periode 2007 - 2020. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(6), 97-108.

- Latifah, N. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka dan dampaknya pada jumlah penduduk miskin di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(02).
- Mahendra, A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 113-138.
- Maulana, H. (2013). *Evaluasi Kinerja Ekonomi Aceh*. Retrieved 2 15, 2022, From [Http://Www.Academia.Edu](http://www.academia.edu)
- Mudrajad, Kuncoro. 2013. *Mudah Memahami dan menganalisis Indikator ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mukhtar, S., & Saptono, A. (2019). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia. *Ecoplan*, 2(2), 77-89.
- Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192.
- Nopirin. (2011). In *Ekonomi Moneter. Buku 2. Edisi Ke-13*. Yogyakarta.: BPFE.
- Primandari. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, P-Issn: 1829-5843*, 1-10.
- Putong, I. (2013). *Economics Pengantar Mikro Dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahman, A., Prihanto, P. H., & Safri, M. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan tingkat pengangguran terbuka terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan*, 8(3), 184-193.
- Sari, P. I., Muljaningsih, S., & Asmara, K. (2021). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(05), 662-671.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10(2).
- Sembiring, I. P. S., Simanjuntak, S., & Sitepu, V. A. (2021). Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2006–2020. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 1-13.
- Sholihin, M. K. (2021). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur. *GEMAH RIPAH: Jurnal Bisnis*, 1(01), 1-7.
- Sukirno, S. (2005). *Pengantar Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, S. (2013). *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*. . Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrik Terapan : Teori dan Aplikasi dengan SPSS Edisi 1*. Yogyakarta: ANDY Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. (2011). *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Utami, H. W., & Masjkuri, S. U. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 28(2).

Utami. (2021). Pengaruh Umr Dan Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016. *Jurnal Pionir Lppm Universitas Asahan E-Issn : 2655-3201*, 254-264.
Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018.